



Madrasah Nizamiyyah Sebagai Lembaga State- Led Education: Analisis Historis Terhadap Politisasi Pendidikan Islam Pada Abad Ke-11

Aliyatinnada¹, Sugeng Listyo Prabowo²

Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korrespondensi: aliyatinnada@gmail.com, sugenglistyo@uin-malang.ac.id

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 16 Januari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study analyzes Madrasah Nizamiyyah as a phenomenon of Islamic education politicization in the 11th century through a historical-critical approach. The madrasah established by Nizam al-Mulk in 1066 marked a fundamental transformation from a spontaneous and egalitarian Islamic education system to a structured state-led education model under state control. Using library research methods with historical content analysis, this study reveals that the establishment of Madrasah Nizamiyyah was motivated by the political interests of the Seljuk Dynasty to consolidate power and combat Shi'ite influence through Sunni orthodox indoctrination. Research findings indicate that educational institutionalization brought paradox: organizational advancement in terms of standardization, financing, and accessibility, yet accompanied by intellectual decline due to restrictions on academic freedom and marginalization of secular sciences. State control mechanisms were implemented through professor appointments based on ideological loyalty, curriculum emphasizing Shafi'i jurisprudence and Ash'ari theology, and scholarship systems creating economic dependency. The long-term impact was intellectual stagnation contributing to Islamic civilization's decline, while Western universities adopted Islamic scholarly heritage. This research emphasizes the importance of maintaining balance between state support and academic autonomy to prevent education instrumentalization for partisan political interests.

Keywords: Nizamiyyah, Politicization of Education, Seljuk Dynasty.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Madrasah Nizamiyyah sebagai fenomena politisasi pendidikan Islam pada abad ke-11 melalui pendekatan historis-kritis. Madrasah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada tahun 1066 menandai transformasi fundamental dari sistem pendidikan Islam yang spontan dan egaliter menuju model state-led education yang terstruktur di bawah kontrol negara. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan analisis isi historis, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian Madrasah Nizamiyyah dimotivasi oleh kepentingan politik Dinasti Seljuk untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan memerangi pengaruh Syiah melalui indoktrinasi ortodoksi Sunni. Temuan penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasi pendidikan membawa paradoks: kemajuan organisasional dalam hal standarisasi, pembiayaan, dan aksesibilitas, namun disertai kemunduran intelektual akibat pembatasan kebebasan akademik dan marginalisasi ilmu-ilmu sekuler. Mekanisme kontrol negara diimplementasikan melalui penunjukan profesor berdasarkan loyalitas ideologis, kurikulum yang menekankan yurisprudensi Syafi'i dan teologi Asy'ari, serta sistem beasiswa yang menciptakan ketergantungan ekonomi. Dampak

jangka panjangnya adalah stagnasi intelektual yang berkontribusi pada kemunduran peradaban Islam, sementara universitas Barat mengadopsi warisan keilmuan Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dukungan negara dan otonomi akademik untuk mencegah instrumentalisasi pendidikan bagi kepentingan politik partisan.

Kata Kunci: *Madrasah Nizamiyyah, Politisasi Pendidikan, Dinasti Seljuk.*

PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan Islam pada periode klasik mencatat transformasi fundamental dalam sistem pendidikan yang terjadi pada abad ke-11 Masehi. Periode ini menandai transisi signifikan dari model pendidikan yang berkembang secara organik dan spontan menuju sistem pendidikan yang terstruktur dan berada di bawah kendali negara. Perubahan paradigma ini tidak dapat dipisahkan dari peran Nizam al-Mulk, seorang wazir terkemuka dalam pemerintahan Dinasti Seljuk, yang mendirikan jaringan madrasah pertama yang tersistematis dalam sejarah Islam. Madrasah Nizamiyyah, sebagai institusi pendidikan negara pertama yang terorganisir secara masif, merepresentasikan babak baru dalam sejarah pendidikan Islam yang membawa implikasi mendalam terhadap arah perkembangan intelektual dunia Islam selanjutnya. Sebelum abad ke-11, pendidikan Islam berkembang melalui sistem yang lebih egaliter dan terbuka (Anjasari 2022). Masjid-masjid berfungsi sebagai pusat pembelajaran utama, sementara perpustakaan umum dan swasta menyediakan akses bebas kepada masyarakat untuk mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sistem halqa atau lingkaran belajar memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang dinamis antara guru dan murid tanpa batasan sektarian yang kaku. Wakaf-wakaf swasta mendukung kegiatan pendidikan dengan fokus pada pencerahan publik dan kemajuan ilmu pengetahuan. Periode keemasan ini, yang berlangsung dari abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-11, ditandai dengan kebebasan akademik yang luas, di mana teologi dan dogma belum membatasi eksplorasi keilmuan. Para sarjana bebas meneliti berbagai bidang pengetahuan mulai dari filsafat, kedokteran, matematika, hingga astronomi tanpa tekanan ideologis yang signifikan (License et al. 2025).

Kemunculan Madrasah Nizamiyyah pada tahun 1066 Masehi menandai pergeseran paradigmatis dalam lanskap pendidikan Islam. Nizam al-Mulk, dengan visi politiknya yang tajam, merancang sistem madrasah sebagai instrumen negara untuk mempromosikan indoktrinasi agama dalam kerangka Islam Sunni ortodoks sekaligus mengkonsolidasikan kekuasaan politik dengan gaya Turki-Persia. Madrasah-madrasah ini didirikan bukan semata-mata untuk tujuan pendidikan universal, melainkan memiliki agenda politik dan religius yang jelas, yaitu membentuk opini publik dalam Islam Sunni untuk melawan pengaruh Syiah. Transformasi ini mengubah esensi pendidikan Islam dari yang semula berorientasi pada pencarian kebenaran ilmiah menjadi alat legitimasi kekuasaan dan uniformitas ideologis. Dana dalam jumlah besar dialokasikan untuk pendirian dan pemeliharaan madrasah-madrasah ini, mencerminkan keseriusan negara dalam mengendalikan wacana intelektual dan keagamaan masyarakat (Harahap,

Kurrahman, and Rusmana 2024). Sistem madrasah yang diinisiasi oleh Nizam al-Mulk berkembang menjadi fenomena massal yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Islam bagian Timur, kecuali Spanyol dan Sisilia. Standardisasi kurikulum dan metode pengajaran diberlakukan untuk memastikan konsistensi doktrin yang diajarkan. Madrasah Nizamiyyah di Baghdad menjadi prototipe institusi pendidikan negara yang kemudian direplikasi di Nishapur, Balkh, Herat, Isfahan, Marw, Basrah, dan Mosul. Diperkirakan sebanyak satu setengah juta dolar dialokasikan setiap tahun untuk lembaga-lembaga pendidikan ini, menunjukkan komitmen finansial yang luar biasa dari pemerintah. Namun, besarnya investasi ini juga mengindikasikan tingginya kepentingan politik yang dipertaruhkan dalam proyek pendidikan tersebut (Khamim, Siregar, and Yaldi 2027).

Politisasi pendidikan Islam melalui madrasah negara menciptakan dinamika baru dalam perkembangan intelektual dunia Islam. Pengangkatan dan pemberhentian profesor sering kali didasarkan pada afiliasi mazhab mereka, khususnya dalam kontestasi antara Sunni dan Syiah. Ilmu Kalam atau teologi Islam berkembang pesat dalam madrasah-madrasah sektarian ini, namun perkembangan tersebut cenderung bersifat defensif dan apologetik daripada eksploratif dan inovatif (Bella and Irawan 2024). Motif pendidikan yang semula berfokus pada pencarian kebenaran dan pengembangan ilmu pengetahuan secara objektif bergeser menjadi upaya mempertahankan ortodoksi dan memerangi pandangan yang dianggap menyimpang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang dampak intervensi negara terhadap kebebasan akademik dan kreativitas intelektual dalam tradisi keilmuan Islam. Madrasah Nizamiyyah di Baghdad, yang dibuka untuk pengajaran pada tahun 1066-1067, menjadi simbol ambivalensi pencapaian pendidikan Islam pada periode ini. Di satu sisi, institusi ini merepresentasikan kemajuan organisasional dalam sistem pendidikan dengan menyediakan beasiswa, tunjangan, fasilitas perpustakaan, dan akses kepada para profesor terbaik. Di sisi lain, orientasi sektariannya yang kuat dan ketundukannya pada kepentingan politik negara membatasi ruang diskursus intelektual. Penolakan awal Abu Ishaq al-Shirazi untuk mengajar di Nizamiyyah karena keraguan terhadap sumber dana yang digunakan dalam pembangunan institusi tersebut mencerminkan dilema moral yang dihadapi oleh para ulama dalam menghadapi sistem pendidikan yang disponsori negara. Insiden ini menyiratkan adanya kesadaran kritis di kalangan cendekiawan tentang potensi kompromi integritas akademik ketika pendidikan menjadi instrumen kekuasaan (Historis et al. 2024).

Perbandingan antara periode pendidikan Islam sebelum dan sesudah institusionalisasi madrasah negara mengungkapkan perubahan mendasar dalam karakter sistem pendidikan. Jika pada masa awal kebebasan penelitian didorong dan instrumen-instrumen penelitian disediakan untuk publik tanpa diskriminasi ideologis, maka pada periode madrasah negara, studi sekuler mulai dipinggirkan dan tunduk pada persetujuan teologis (Rahman and Masyhudi 2023). Kurikulum yang semula komprehensif dan seimbang antara studi keagamaan dan sekuler berubah menjadi lebih formal, dogmatis, dan berorientasi ke belakang. Ironisnya, proliferasi madrasah-madrasah denominasi setelah abad ke-11 justru bertepatan dengan kemunduran intelektual Islam, di mana inovasi ilmiah dan filosofis mulai

stagnan sementara universitas-universitas Barat yang baru lahir mulai mengadopsi dan mengembangkan warisan intelektual Islam. Fenomena politisasi pendidikan melalui Madrasah Nizamiyyah memiliki relevansi historis yang penting untuk dipahami dalam konteks hubungan antara negara dan pendidikan. Pengalaman historis ini menawarkan pelajaran berharga tentang konsekuensi jangka panjang dari subordinasi pendidikan terhadap kepentingan politik dan ideologis. Studi mendalam terhadap Madrasah Nizamiyyah sebagai model pendidikan yang dipimpin negara dapat memberikan perspektif kritis tentang dinamika kompleks antara otoritas politik, ortodoksi keagamaan, dan kebebasan intelektual. Analisis historis terhadap fenomena ini tidak hanya relevan untuk memahami masa lalu pendidikan Islam, tetapi juga untuk merefleksikan tantangan kontemporer dalam menjaga independensi dan integritas institusi pendidikan di tengah berbagai tekanan politik dan ideologis yang masih berlangsung hingga saat ini (Analisis, Dan, and Novianto 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan fundamental mengenai transformasi sistem pendidikan Islam pada abad ke-11. Pertama, bagaimana proses historis transformasi pendidikan Islam dari sistem yang berkembang secara spontan dan egaliter menuju sistem pendidikan yang terlembagakan di bawah kendali negara melalui Madrasah Nizamiyyah? Kedua, bagaimana mekanisme politisasi pendidikan Islam termanifestasi dalam struktur organisasi, kurikulum, dan tujuan pendidikan Madrasah Nizamiyyah? Ketiga, apa implikasi historis dari model pendidikan yang dipimpin negara tersebut terhadap perkembangan intelektual dan kebebasan akademik dalam tradisi keilmuan Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarahkan penelitian ini untuk mengeksplorasi dimensi politik, ideologis, dan pedagogis dari Madrasah Nizamiyyah sebagai fenomena pendidikan yang kompleks. Analisis akan difokuskan pada dialektika antara kepentingan negara, ortodoksi keagamaan, dan aspirasi keilmuan dalam konteks sosio-politik abad ke-11 yang ditandai oleh persaingan mazhab dan konsolidasi kekuasaan dinasti Seljuk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan komprehensif fenomena Madrasah Nizamiyyah sebagai model pendidikan yang dipimpin negara dalam konteks sejarah pendidikan Islam abad ke-11. Secara spesifik, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor politik, ideologis, dan sosial yang mendorong transformasi sistem pendidikan Islam dari model berbasis masyarakat menuju model yang terkontrol negara, serta mengungkapkan mekanisme-mekanisme konkret politisasi pendidikan yang terjadi dalam praktik operasional Madrasah Nizamiyyah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari institusionalisasi pendidikan negara terhadap dinamika intelektual Islam, khususnya dalam hal kebebasan akademik, inovasi keilmuan, dan pluralitas pemikiran. Melalui analisis historis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih nuansif tentang kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan institusi pendidikan dalam peradaban Islam klasik.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian sejarah pendidikan Islam dengan menyediakan analisis kritis terhadap salah

satu institusi pendidikan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus tentang hubungan antara negara dan pendidikan dengan menawarkan perspektif historis yang dapat memperkaya pemahaman teoretis tentang fenomena politisasi pendidikan. Dengan mengungkap kompleksitas dan ambiguitas Madrasah Nizamiyyah sebagai proyek pendidikan negara, penelitian ini mendorong refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi yang sering tidak dipertanyakan tentang peran negara dalam pendidikan. Secara praktis, temuan penelitian ini relevan untuk konteks kontemporer di mana isu politisasi pendidikan dan hubungan antara negara dengan institusi pendidikan masih menjadi perdebatan aktual. Pengalaman historis Madrasah Nizamiyyah menawarkan pelajaran berharga tentang konsekuensi potensial dari subordinasi pendidikan terhadap agenda politik dan ideologis, yang dapat menginformasikan kebijakan pendidikan masa kini untuk menjaga keseimbangan antara peran negara sebagai fasilitator pendidikan dan perlindungan terhadap otonomi akademik serta pluralitas intelektual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji Madrasah Nizamiyyah sebagai institusi pendidikan yang dipimpin negara pada abad ke-11. Data diperoleh dari sumber primer seperti karya sejarawan klasik (Ibn Khaldun, Ibn Jubair, al-Yaqubi) dan tokoh pendidikan Islam (al-Ghazali, Nizam al-Mulk), serta sumber sekunder berupa buku dan artikel akademik terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran sistematis, pencatatan terstruktur, dan kategorisasi tematik. Analisis data menggunakan *content analysis* historis dengan pendekatan kritis-interpretatif melalui tahap pembacaan mendalam, kodifikasi, interpretasi, dan triangulasi sumber. Validitas dijaga melalui kritik eksternal dan internal terhadap sumber, sedangkan reliabilitas diperkuat dengan dokumentasi yang transparan, penggunaan berbagai sumber, serta *cross-checking* informasi untuk menghasilkan analisis yang objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Pendidikan Islam Pra-Nizamiyyah

Pendidikan Islam sebelum abad ke-11 berkembang dalam suasana yang relatif bebas dan spontan, ditandai dengan ketiadaan kontrol negara yang sistematis terhadap institusi-institusi pembelajaran. Masjid-masjid berfungsi sebagai pusat utama aktivitas pendidikan dengan sistem *halqa* atau lingkaran belajar yang memungkinkan interaksi langsung antara guru dan murid tanpa batasan ideologis yang kaku. Perpustakaan umum seperti *Bayt al-Hikmah* di Baghdad menyediakan akses terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan. Periode ini juga ditandai dengan mobilitas akademik yang tinggi, di mana para sarjana bebas berkelana dari satu pusat pembelajaran ke pusat lainnya, menciptakan jaringan intelektual yang luas dan dinamis di seluruh dunia Islam. Karakteristik pendidikan Islam pada masa awal ini adalah penekanannya pada universalitas ilmu pengetahuan dan kesetaraan akses. Wakaf-

wakaf swasta membiayai kegiatan pendidikan dengan fokus pada pencerahan publik tanpa diskriminasi mazhab atau afiliasi politik tertentu. Para khalifah Abbasiyah, meskipun menjadi patron pembelajaran, tidak secara sistematis menggunakan institusi pendidikan sebagai alat indoktrinasi politik. Kebebasan akademik memungkinkan berkembangnya berbagai aliran pemikiran, dari rasionalisme Mu'tazilah hingga filosofi Peripatetik, menciptakan atmosfer intelektual yang plural dan produktif. Teologi dan dogma belum membatasi eksplorasi keilmuan, sehingga para sarjana dapat meneliti filsafat Yunani, sains, matematika, dan kedokteran tanpa tekanan untuk menyesuaikan temuan mereka dengan ortodoksi tertentu. Sistem pendidikan pra-Nizamiyyah juga ditandai dengan fleksibilitas kurikulum dan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan minat individual. Tidak ada standarisasi kurikulum yang dipaksakan dari atas, sehingga setiap guru memiliki otonomi untuk menentukan materi dan pendekatan pedagogisnya. Pendidikan tinggi berlangsung melalui pembelajaran langsung dari para sarjana besar di rumah mereka, di perpustakaan, atau di masjid-masjid tertentu yang menjadi pusat keunggulan dalam bidang tertentu. Sistem ini, meskipun kurang terorganisir secara formal, terbukti efektif dalam menghasilkan generasi sarjana yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peradaban Islam pada masa keemasannya antara abad ke-9 hingga ke-11 (Tasari, Roza, and Dewi 2023).

Latar Politik Pendirian Madrasah Nizamiyyah

Pendirian Madrasah Nizamiyyah tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang kompleks pada abad ke-11, khususnya dinamika kekuasaan Dinasti Seljuk dan persaingan ideologis antara Islam Sunni dan Syiah. Nizam al-Mulk, sebagai wazir dari Sultan Seljuk, menghadapi tantangan untuk mengkonsolidasi legitimasi politik dinasti yang relatif baru ini sambil menghadapi ancaman ideologis dari Kekhalifahan Fatimiyah yang bermazhab Syiah di Mesir. Madrasah dirancang sebagai instrumen untuk membentuk konsensus ideologis di kalangan elite intelektual dan massa Muslim, mempromosikan ortodoksi Sunni khususnya mazhab Syafi'i sebagai identitas keagamaan yang sejalan dengan kepentingan politik Seljuk. Strategi ini mencerminkan pemahaman mendalam Nizam al-Mulk tentang kekuatan wacana keagamaan dalam melegitimasi kekuasaan politik. Motivasi politik di balik pendirian madrasah juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan birokrasi yang loyal dan kompeten untuk menjalankan administrasi negara. Para lulusan madrasah diharapkan tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memiliki kesetiaan ideologis kepada negara dan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan sesuai dengan visi Turki-Persia. Dalam karyanya *Siyasat-Namah*, Nizam al-Mulk menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk pejabat negara yang memiliki integritas moral dan kompetensi teknis. Namun, konsep integritas moral dalam konteks ini tidak netral secara ideologis, melainkan terikat pada ortodoksi Sunni dan kepatuhan terhadap otoritas politik yang sah. Dengan demikian, madrasah berfungsi sebagai mekanisme reproduksi elite yang secara simultan religius dan politis. Persaingan dengan institusi pendidikan Syiah, khususnya Dar al-'Ilm di Kairo yang didirikan

oleh Dinasti Fatimiyah, menjadi faktor penting yang mempercepat formalisasi sistem madrasah Sunni. Nizam al-Mulk menyadari bahwa perang ideologi tidak hanya dilakukan di medan pertempuran tetapi juga di ruang-ruang kelas dan institusi pendidikan. Investasi finansial yang masif untuk madrasah, diperkirakan mencapai satu setengah juta dolar per tahun, menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi strategis untuk keamanan dan stabilitas politik jangka panjang. Fenomena ini mengkonfirmasi bahwa Madrasah Nizamiyyah, sejak awal konsepsinya, dirancang bukan semata sebagai institusi pendidikan tetapi sebagai aparatus ideologis negara yang bertujuan untuk hegemoni Sunni dalam lanskap intelektual dan politik dunia Islam (Bustamam 2020).

Struktur Organisasi dan Sistem Kontrol Negara

Struktur organisasi Madrasah Nizamiyyah mencerminkan kontrol negara yang ketat terhadap seluruh aspek operasional institusi pendidikan. Penunjukan profesor dilakukan langsung oleh Nizam al-Mulk atau wakilnya, memastikan bahwa hanya ulama yang memiliki kredensial ortodoks dan loyalitas politik yang diangkat dalam posisi-posisi kunci. Kasus penolakan Abu Ishaq al-Shirazi untuk mengajar di Nizamiyyah Baghdad, meskipun ia akhirnya menerima jabatan tersebut atas desakan murid-muridnya, menunjukkan bahwa terdapat resistensi di kalangan ulama terhadap politisasi institusi pendidikan. Namun, sistem patronase yang kuat dan insentif finansial yang ditawarkan membuat sebagian besar ulama bersedia bekerja dalam kerangka yang ditetapkan oleh negara. Sistem beasiswa dan tunjangan yang disediakan untuk para siswa juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol tidak langsung. Dengan memberikan dukungan finansial penuh termasuk makanan, tempat tinggal, dan uang saku kepada para siswa, negara menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperkuat loyalitas ideologis. Para siswa yang menerima beasiswa ini diharapkan tidak hanya menguasai kurikulum yang telah ditetapkan tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai ortodoksi Sunni dan orientasi politik pro-Seljuk. Standardisasi madrasah di berbagai kota besar dari Baghdad hingga Nishapur memungkinkan negara untuk menciptakan uniformitas dalam pendidikan, memastikan bahwa lulusan dari berbagai wilayah memiliki worldview yang homogen dan sejalan dengan kepentingan negara. Mekanisme pengawasan akademik juga diimplementasikan melalui kurikulum yang terpusat dan pembatasan terhadap kebebasan mengajar. Profesor tidak memiliki otonomi penuh untuk menentukan materi yang diajarkan; mereka harus mengikuti kerangka kurikulum yang menekankan yurisprudensi Syafi'i dan teologi Asy'ari sebagai pilar utama. Pemberhentian profesor berdasarkan afiliasi mazhab mereka, khususnya terhadap ulama Syiah, menunjukkan bahwa kriteria kompetensi akademik bukan satu-satunya pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di madrasah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Madrasah Nizamiyyah beroperasi dalam logika eksklusi ideologis, di mana pluralitas pemikiran dikorbankan demi kohesi doktrin dan stabilitas politik yang dipandang lebih prioritas oleh penguasa (Manan 2025).

Transformasi Kurikulum dan Tujuan Pendidikan

Kurikulum Madrasah Nizamiyyah mengalami transformasi signifikan dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam sebelumnya, ditandai dengan dominasi studi keagamaan dan marginalisasi ilmu-ilmu sekuler. Penekanan utama diberikan pada pengajaran mazhab hukum Syafi'i, teologi Asy'ari, dan studi hadis, sementara filsafat, sains empiris, dan matematika mendapat porsi yang jauh lebih kecil atau bahkan dipandang dengan kecurigaan. Pergeseran ini mencerminkan prioritas ideologis negara yang lebih mementingkan pembentukan identitas keagamaan yang seragam daripada pengembangan intelektual yang komprehensif. Ilmu Kalam berkembang pesat dalam madrasah-madrasah ini, namun karakternya lebih bersifat apologetik dan defensif, bertujuan untuk mempertahankan ortodoksi terhadap tantangan rasionalisme dan heterodoksi. Tujuan pendidikan dalam kerangka Madrasah Nizamiyyah juga mengalami redefinisi dari yang semula berorientasi pada pencarian kebenaran universal menjadi indoktrinasi sektarian. Konsep adab atau pendidikan karakter yang pada periode sebelumnya menekankan keluhuran budi dan keunggulan intelektual kini lebih ditekankan pada konformitas terhadap norma-norma ortodoksi dan kepatuhan terhadap otoritas. Tradisi Islam yang dikutip dari Nabi Muhammad tentang pentingnya menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat dalam pendidikan mulai diinterpretasikan secara sempit, di mana "urusan dunia" tidak lagi mencakup eksplorasi bebas terhadap ilmu pengetahuan sekuler tetapi lebih kepada keterampilan administratif yang berguna bagi birokrasi negara. Perubahan ini menandai pergeseran dari konsep pendidikan sebagai pencerahan menuju pendidikan sebagai sosialisasi ideologis. Marginalisasi ilmu-ilmu sekuler dalam kurikulum madrasah memiliki implikasi jangka panjang terhadap tradisi keilmuan Islam. Jika pada masa keemasan Islam para sarjana seperti Ibn Sina, al-Farabi, dan al-Biruni dapat dengan bebas mengintegrasikan filsafat, sains, dan teologi dalam karya-karya mereka, maka dalam konteks madrasah negara, disiplin-disiplin ini mulai terpisah dan hierarkis. Ilmu-ilmu agama ditempatkan sebagai yang paling mulia dan wajib dipelajari, sementara ilmu-ilmu sekuler dianggap sebagai 'ulum al-awa'il (ilmu-ilmu orang terdahulu) yang inferior dan berpotensi menyesatkan. Dikotomi ini menciptakan fragmentasi dalam tradisi intelektual Islam dan menghambat perkembangan pemikiran yang integratif dan inovatif, berkontribusi pada stagnasi intelektual yang mulai terlihat pada abad-abad berikutnya (Qamariah and Anwar 2025).

Dampak terhadap Kebebasan Akademik dan Pluralitas Pemikiran

Institusionalisasi pendidikan di bawah kontrol negara melalui Madrasah Nizamiyyah membawa dampak signifikan terhadap kebebasan akademik yang sebelumnya relatif terjaga dalam sistem pendidikan Islam. Kebebasan untuk berdebat dan mempertanyakan otoritas intelektual, yang pada masa awal Islam menjadi ciri khas metode pembelajaran di halqa dan masjid, mulai dibatasi oleh keharusan untuk mematuhi ortodoksi Sunni yang telah ditetapkan. Para sarjana yang memiliki pandangan yang berbeda dari mainstream Sunni-Syafi'i menghadapi risiko marginalisasi, kehilangan posisi akademik, atau bahkan penganiayaan.

Ruang untuk eksplorasi intelektual yang bebas menyempit seiring dengan penguatan kontrol ideologis negara terhadap wacana keagamaan dan keilmuan. Pluralitas pemikiran yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan peradaban Islam mengalami kemunduran sebagai konsekuensi dari sektarianisasi pendidikan. Kompetisi antara madrasah-madrasah denominasi Sunni dan Syiah, meskipun meningkatkan jumlah institusi pendidikan dan fasilitas fisiknya, justru memperdalam fragmentasi intelektual. Setiap madrasah denominasi cenderung menutup diri dari dialog dengan tradisi pemikiran lain, menciptakan echo chambers ideologis di mana validitas suatu pemikiran dinilai bukan dari kekuatan argumen atau bukti empirisnya tetapi dari kesesuaiannya dengan doktrin mazhab tertentu. Fenomena ini kontras dengan periode sebelumnya ketika Baghdad, Basra, dan Khurasan menjadi pusat-pusat perdebatan intelektual yang melibatkan berbagai aliran pemikiran dari Mu'tazilah, Asy'ariyah, filsuf, dan saintis. Dampak jangka panjang dari pembatasan kebebasan akademik ini terlihat pada menurunnya inovasi intelektual dalam peradaban Islam setelah abad ke-12. Sementara madrasah-madrasah denominasi terus berkembang dalam jumlah, kualitas produksi intelektualnya cenderung menurun dan bersifat repetitif. Para sarjana lebih banyak menghasilkan komentar atas komentar (hawasyi dan taqirrat) daripada karya-karya orisinal yang membuka cakrawala baru dalam pemikiran. Ironisnya, pada periode yang sama, universitas-universitas Barat yang baru lahir seperti Bologna, Paris, dan Oxford mulai mengadopsi dan mengembangkan warisan intelektual Islam yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karya-karya para pemikir Muslim seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, dan al-Razi menjadi teks wajib di universitas-universitas Eropa, sementara di dunia Islam sendiri karya-karya ini mulai dipinggirkan karena dianggap terlalu filosofis dan berpotensi menyimpang dari ortodoksi (Gusman, Ahmad, and Yogyakarta 2022).

Paradoks Pencapaian dan Kemunduran

Madrasah Nizamiyyah merepresentasikan paradoks fundamental dalam sejarah pendidikan Islam: kemajuan organisasional yang diiringi oleh kemunduran intelektual. Dari sisi organisasional, sistem madrasah yang diinisiasi oleh Nizam al-Mulk merupakan inovasi administratif yang luar biasa, menciptakan jaringan institusi pendidikan yang terstandarisasi, terbiayai dengan baik, dan dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Penyediaan beasiswa penuh, fasilitas perpustakaan, asrama, dan akses kepada para profesor terkemuka mencerminkan komitmen serius terhadap pendidikan universal. Dalam konteks ini, Madrasah Nizamiyyah dapat dipandang sebagai prototipe universitas modern dengan sistem pendanaan negara dan standar akademik yang jelas. Namun, pencapaian organisasional ini diperoleh dengan mengorbankan vitalitas intelektual dan kebebasan akademik yang menjadi ciri pendidikan Islam pada masa keemasannya. Standardisasi kurikulum dan uniformitas doktrin yang dipaksakan menghambat kreativitas dan inovasi pemikiran. Para sarjana yang sebelumnya bebas mengeksplorasi berbagai tradisi intelektual dari Yunani, Persia, dan India kini harus membatasi penelitian mereka dalam kerangka yang dapat diterima oleh ortodoksi Sunni. Metode pengajaran yang sebelumnya dialogis dan kritis mulai

bergeser menjadi lebih dogmatis dan berbasis hafalan. Jika pada abad ke-9 hingga ke-11 dunia Islam menghasilkan pemikir-pemikir besar seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, dan al-Biruni yang memberikan kontribusi orisinal dalam berbagai bidang, maka setelah institusionalisasi madrasah negara, produksi intelektual cenderung bersifat kompilatoris dan eksegesis. Paradoks ini mengungkapkan dilema mendasar dalam hubungan antara negara dan pendidikan: ketika negara terlalu intervensionis dalam mengontrol institusi pendidikan untuk kepentingan politik dan ideologis, maka tujuan pendidikan yang sesungguhnya yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis, inovasi, dan pencarian kebenaran dapat terdistorsi. Pengalaman Madrasah Nizamiyyah menunjukkan bahwa meskipun dukungan negara dapat meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pendidikan, namun jika dukungan tersebut disertai dengan kontrol ideologis yang ketat, hasilnya justru dapat kontraproduktif terhadap kemajuan intelektual. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kemajuan pendidikan yang sejati memerlukan keseimbangan antara dukungan material dari negara dan otonomi akademik yang memungkinkan berkembangnya pluralitas pemikiran dan inovasi keilmuan (Nuri et al. 2024).

Relevansi Historis dan Implikasi Kontemporer

Analisis historis terhadap Madrasah Nizamiyyah memiliki relevansi yang signifikan untuk memahami dinamika kontemporer hubungan antara negara dan pendidikan, khususnya dalam konteks Muslim. Pola politisasi pendidikan yang terjadi pada abad ke-11 memiliki kemiripan struktural dengan fenomena yang masih berlangsung di berbagai negara Muslim modern, di mana institusi pendidikan sering kali digunakan sebagai instrumen untuk membentuk identitas nasional, mempromosikan ideologi tertentu, atau memerangi pandangan yang dianggap menyimpang. Pengalaman historis ini menawarkan perspektif kritis untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan kontemporer yang cenderung memprioritaskan uniformitas ideologis di atas keberagaman intelektual dan kebebasan akademik. Studi kasus Madrasah Nizamiyyah juga mengungkapkan konsekuensi jangka panjang dari subordinasi pendidikan terhadap kepentingan politik. Kemunduran intelektual dunia Islam setelah abad ke-12, yang bertepatan dengan proliferasi madrasah-madrasah denominasi, menunjukkan bahwa meskipun jumlah institusi pendidikan meningkat, kualitas produksi intelektual justru menurun ketika pendidikan lebih diorientasikan pada indoktrinasi daripada pencerahan. Fenomena ini memberikan peringatan tentang bahaya instrumentalisasi pendidikan untuk tujuan-tujuan yang bersifat partisan atau sektarian. Dalam konteks kontemporer, di mana banyak negara Muslim masih bergulat dengan isu radikalisme, ekstremisme, dan fragmentasi sosial, pelajaran dari sejarah Madrasah Nizamiyyah mengingatkan pentingnya menjaga pendidikan sebagai ruang untuk dialog, pluralitas, dan pemikiran kritis. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya reorientasi kebijakan pendidikan yang lebih menghargai otonomi akademik dan mendorong keberagaman intelektual. Dukungan negara terhadap pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, namun dukungan tersebut harus diberikan tanpa syarat-syarat ideologis yang membatasi kebebasan berpikir. Pengalaman

historis menunjukkan bahwa peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya ketika ada kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai tradisi intelektual dan keterbukaan terhadap pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu, revitalisasi tradisi keilmuan Islam memerlukan rekonstruksi sistem pendidikan yang dapat mengintegrasikan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dengan keterbukaan terhadap pluralitas pemikiran, metode ilmiah yang rigor, dan dialog dengan berbagai tradisi intelektual global, mengembalikan semangat pencarian kebenaran yang menjadi ciri pendidikan Islam pada masa keemasannya (Fuadi 2025).

SIMPULAN

Madrasah Nizamiyyah merepresentasikan transformasi fundamental dalam sejarah pendidikan Islam dari sistem yang berkembang secara spontan dan egaliter menuju model pendidikan yang terlembagakan di bawah kontrol negara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian madrasah oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11 didorong oleh motivasi politik untuk mengkonsolidasi kekuasaan Dinasti Seljuk dan memerangi pengaruh Syiah melalui indoktrinasi ortodoksi Sunni. Meskipun sistem madrasah menghadirkan kemajuan organisasional dengan standarisasi kurikulum, penyediaan beasiswa, dan infrastruktur yang memadai, institusionalisasi ini paradoksalnya menghambat kebebasan akademik dan pluralitas pemikiran yang sebelumnya menjadi kekuatan peradaban Islam. Politisasi pendidikan melalui mekanisme kontrol negara terhadap penunjukan profesor, kurikulum, dan tujuan pendidikan menyebabkan marginalisasi ilmu-ilmu sekuler dan dominasi studi keagamaan yang dogmatis. Dampak jangka panjangnya adalah stagnasi intelektual yang berkontribusi pada kemunduran peradaban Islam, sementara Barat mengadopsi warisan keilmuan Islam dan mengembangkannya menjadi fondasi Renaisans. Pengalaman historis ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dukungan negara dan otonomi akademik dalam sistem pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Analisis, Islam, Historis Dan, and Erik Novianto. 2025. "Article History:" 2 (3): 688–98.
- Anjasari, Titi. 2022. "Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru" 2: 141–55. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>.
- Bella, Sinta, and M Ferry Irawan. 2024. "Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Sejatinya Sudah Dimulai" 03 (01): 52–62. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i1.1599>.
- Bustamam, Mutia. 2020. "Eksistensi Madrasah Nizhamiyah Dalam Pendidikan Islam" 8523: 1–10.
- Fuadi, Sirojul. 2025. "ISLAM DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN : ANALISIS TERHADAP SISTEM DAN" 2 (4): 1008–14.

- Gusman, Burhanudin Ata, Universitas Ahmad, and Dahlan Yogyakarta. 2022. "Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama , Orde Baru Dan Reformasi" 5 (2).
- Harahap, Yasmin, Opik Taufik Kurrahman, and Dadan Rusmana. 2024. "Analisis Historis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia Historis Pengembangan Kurikulum . Landasan Historis Dalam Pengembangan Kurikulum."
- Historis, Analisis, Madrasah Nizamiyyah, U I N Sultan, Aji Muhammad, Idris Samarinda, and Kalimantan Timur. 2024. "Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan (Studi Analisis Historis Madrasah Nizamiyyah)," 23-33.
- Khamim, Siti, Nuryanti Siregar, and Yusri Yaldi. 2027. "Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia" 4: 2027-42.
- License, International, Ahmad Khaerussalam, Ahmad Faruq Khaqiqi, and Abdurrahman Siregar. 2025. "Revitalisasi Peradaban Islam : Menjembatani Teori Reformis Dan Realitas Kontemporer," no. June: 282-93.
- Manan, Nuraini A. 2025. "Peran Strategis Umat Islam Indonesia : Refleksi Dari Sudut Pandang Partisipan Tentang Reformasi , Politisasi Agama , Dan Sekularisasi" 6 (2).
- Nuri, Mei, Hafidha Sari, Ewiniarti Hawa, Febby Aulia Sari, and Mahfud Ifendi. 2024. "Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Reformasi" 2: 127-33. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>.
- Qamariah, Zaitun, and Khairil Anwar. 2025. "Analisis Konseptual Kurikulum Cinta : Pendekatan Humanistik Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam" 5 (2).
- Rahman, Ikhwan, and Fauza Masyhudi. 2023. "Pengaruh Madrasah Nizamiyah Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Dan Ortodoksi Sunni The Influence of Nizamiyah Madrasahs on Development Islamic Education and Sunni Orthodoxy" 8 (2): 1-14.
- Tasari, Rozi, Ellya Roza, and Eva Dewi. 2023. "POLA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH NIZHAMIYAH DAN INDONESIA" 7 (12): 165-73.